



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DAERAH OPERASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FENI NOVIDA SARAGIH
2. Jabatan : MANAGER HUBUNGAN MASYARAKAT DAERAH
3. NHK : 946475

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	900.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/52 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	700.000
1. LAINNYA, SEPEDA POLYGON Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 700.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	38.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	85.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.023.700.000
III. HUTANG	Rp.	850.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	173.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DAERAH OPERASI

I. DATA PRIBADI

- Nama** : MAHENDRO TRANG BAWONO
- Jabatan** : MANAGER HUBUNGAN MASYARAKAT DAERAH
- NHK** : 680838

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	875.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/117 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp. 875.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	---
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	275.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	4.247.864
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	92.798.200
F. HARTA LAINNYA	Rp.	94.136.335
Sub Total	Rp.	1.341.182.399
III. HUTANG	Rp.	1.350.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-8.817.601

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : PORTFOLIO MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY DIRECTORATE

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEGUH CATUR PRAKOSA**
2. Jabatan : **MANAGER OF IT PRODUCT FINANCE**
3. NHK : **275386**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	239.400.000
1. MOBIL, TOYOTA NEW VELOZ Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp.	206.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX 155 2DP R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	22.800.000
3. MOTOR, YAMAHA GEAR B3W A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp.	10.600.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.949.302
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	245.349.302
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	245.349.302

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : OPERATION DIRECTORATE

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG SETYAWAN**
2. Jabatan : **MANAGER OF NON TRAIN CREW CONTROL AND EVALUATION**
3. NHK : **907886**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	110.650.000
1. MOBIL, TOYOTA YARIS S Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp.	
89.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA XABRE Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	
10.500.000		
3. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z Tahun 2005, WARISAN	Rp.	
4.400.000		
4. MOTOR, HONDA BEAT FI Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	
6.250.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	70.354.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	529.347.868
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	710.351.868
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	710.351.868

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTORAT KESELAMATAN DAN KEAMANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDRI HARYANTO**
2. Jabatan : **MANAGER OF SECURITY VITAL OBJECT AND ASSETS**
3. NHK : **978718**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	550.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/36 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	132.000.000
1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
3. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	80.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	762.000.000
III. HUTANG	Rp.	89.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	673.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTORAT KESELAMATAN DAN KEAMANAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ANDIKA DANIARSA
- Jabatan** : SENIOR MANAGER PROGRAM, BUDGETING, AND CERTIFICATION
- NHK** : 524265

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	492.000.000
1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	27.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI DESTINATOR Tahun 2025, HASIL SENDIRI	Rp.	465.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	43.169.518
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	535.169.518
III. HUTANG	Rp.	225.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	310.169.518

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTORAT KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SALMA ISRA LIANORA
2. Jabatan : SECTION HEAD OF ERP HUMAN RESOURCE
3. NHK : 423165

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.391.441.739
1. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/52 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 505.762.000		
2. Bangunan Seluas 338 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 346.941.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/116 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.538.738.739		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	214.187.500
1. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S A/T TRD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 196.687.500		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	157.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	99.572.359
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	617.828.953
F. HARTA LAINNYA	Rp.	16.252.041
Sub Total	Rp.	4.496.782.592
III. HUTANG	Rp.	1.680.416.760
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.816.365.832

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRAPTO
2. Jabatan : MANAGER MULTIMEDIA
3. NHK : 210614

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 980.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/112 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 127.000.000

1. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA X-RIDE SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 80.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.796.391

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.195.296.391

III. HUTANG Rp. 80.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.115.296.391



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Agustus 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BRAMANTYA CANDRIKA**
2. Jabatan : **MANAGER OF CORPORATE IMAGE CARE**
3. NHK : **1025197**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	200.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH TRD SPORTIVO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	10.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	120.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.830.000.000
III. HUTANG	Rp.	800.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.030.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOVA ADRIAN NUGRAHA
2. Jabatan : MANAGER OF PUBLIC INFORMATION CARE
3. NHK : 1036565

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	117.000.000
1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	
100.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	
17.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	19.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	236.000.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	236.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRAPTO
2. Jabatan : MANAGER MULTIMEDIA
3. NHK : 210614

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 980.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/112 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 127.000.000

1. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA X-RIDE SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 80.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 7.796.391

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.195.296.391

III. HUTANG

Rp. 80.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.115.296.391



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UJANG RUSEN PERMANA**
2. Jabatan : **MANAGER OF MULTIMEDIA**
3. NHK : **1036352**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	113.000.000
1. Tanah Seluas 70 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000		
2. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	24.000.000
1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	102.370.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.558.473
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	250.928.473
III. HUTANG	Rp.	600.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-349.071.527

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOXY CITREA BRIDARA
2. Jabatan : MANAGER COMMUNITY RELATIONS
3. NHK : 199145

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	96.500.000
1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
2. MOBIL, NISSAN MARCH 1,5 L Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.950.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.950.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.414.400.000
III. HUTANG	Rp.	1.200.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	214.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.